

# **“PENUGASAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENGUSAHAAN JALAN TOL” (STUDI: PENUGASAN PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) DALAM PENGUSAHAAN JALAN TOL DI SUMATERA)**

## **ABSTRAKSI**

**Agus Riyanto**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan program Pemerintah dalam rangka percepatan pengembangan Kawasan di Sumatera. Pokok permasalahannya adalah Pemerintah telah menugaskan PT. Hutama Karya (Persero) untuk melakukan pengusahaan jalan tol pada 24 Ruas Jalan Tol di Sumatera yang layak ekonomi namun secara keseluruhan tidak layak finansial. Dalam penelitian ini menimbulkan pertanyaan apakah penugasan tersebut dapat diberikan kepada PT. Hutama Karya (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Persero untuk pengusahaan 24 Ruas Jalan Tol di Sumatera? Penelitian ini dilakukan dengan metode normative yuridis dengan mengacu pada teori asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Solusi dari penelitian ini adalah bagaimana Pemerintah seharusnya dapat menunjuk PT. Hutama Karya (Persero) dengan memperhatikan AUPB dan tidak bertentangan dengan regulasi di sektor infrastruktur Jalan Tol.

**Kata Kunci:** Pengusahaan Jalan Tol, BUMN, Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik.

**“PENUGASAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM  
PENGUSAHAAN JALAN TOL” (STUDI: PENUGASAN PT. HUTAMA  
KARYA (PERSERO) DALAM PENGUSAHAAN JALAN TOL DI  
SUMATERA)**

***ABSTRACT***

**Agus Riyanto**

*This study aims to examine the implementation of Government programs in the context of accelerating the development of Regions in Sumatra. The main problem is that the Government has assigned PT. Hutama Karya (Persero) to operate toll roads on 24 Toll Roads in Sumatra that are economically feasible but overall are not financially viable. In this study raises the question whether the assignment can be given to PT. Hutama Karya (Persero) as a State-Owned Enterprise (BUMN) in the form of a Persero for the operation of 24 Toll Roads in Sumatra? This research was conducted using the juridical normative method with reference to the general principles of good governance (AUPB) theory. The solution of this research is how the Government should be able to appoint PT. Hutama Karya (Persero) by taking into account AUPB and not in conflict with regulations in the toll road infrastructure sector.*

***Keywords:*** Toll Road Concession, SOEs, Principles of Good Governance